

DPMPTSP

2026



RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025–2029, serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026.

Renja ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur pada Tahun 2026 dalam rangka meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif, mendorong peningkatan realisasi investasi daerah, serta mewujudkan pelayanan penanaman modal dan perizinan berusaha yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

Dalam penyusunannya, Renja DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 telah memperhatikan sinergi dan keterpaduan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh jajaran DPMPTSP dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara terarah, terukur, dan bertanggung jawab.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga Renja DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lombok Timur.

Lombok Timur, Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



drh. H. ACHSAN NASIRUL HUDA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660427 199303 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1,1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur	6
2.2 Analisis Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur	9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur	13
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	14
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	16
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	16
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur	17
3.3 Program Dan Kegiatan.....	19
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	23
4.1 Rencana Program Dan Kegiatan.....	23
4.2 Rencana Pendanaan Perangkat Daerah.....	23
4.3 Keterkaitan Rencana Kerja dan Pendanaan dengan Sasaran Pembangunan Daerah.....	24
BAB V P E N U T U P	27

Lampiran-lampiran :

- Tabel 2.2.1 : Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2025.
- Tabel 2.2.2 : Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur Periode Pelaksanaan 2024 dan 2025.
- Tabel 2.3.1 : Permasalahan dan Isu Strategis Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur.

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025–2029. Penyusunan Renja ini juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi pada urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2026 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mendukung tema dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 yang menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing. Dalam konteks tersebut, penanaman modal memiliki peran strategis sebagai penggerak utama perekonomian daerah melalui peningkatan realisasi investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan usaha lokal, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah.

Seiring dengan dinamika perkembangan ekonomi dan meningkatnya tuntutan masyarakat serta pelaku usaha, kualitas pelayanan perizinan berusaha dituntut untuk semakin cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, perencanaan program dan kegiatan DPMPTSP Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat iklim penanaman modal yang kondusif, meningkatkan efektivitas promosi dan fasilitasi investasi, serta mengoptimalkan pelayanan penanaman modal berbasis elektronik.

Selain itu, penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2026 juga mempertimbangkan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Hal ini diwujudkan melalui penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan

nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta pemenuhan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya pada area perizinan dan pencegahan korupsi.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah, isu strategis penanaman modal, serta tantangan pelayanan perizinan, Renja DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Renja ini memuat prioritas pembangunan, target kinerja, serta kebutuhan pendanaan yang terukur dan realistis, sehingga diharapkan mampu menjadi instrumen pengendali dan evaluasi kinerja perangkat daerah serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 ini disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2016 No.114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 No.6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur No.4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur 2025-2029;
19. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas sumberdaya yang ada. Rencana Program dan Kegiatan prioritas adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang ada.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026, yaitu:

- a. Menghubungkan Renstra dengan perencanaan operasional yang lebih terinci;
- b. Memberikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
- c. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program;
- d. Dapat menjadi suatu *performance agreement*;
- e. Memudahkan proses pengukuran kinerja;

- f. Membantu monitoring dan evaluasi kinerja;
- g. Membantu menetapkan kinerja periode berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur.
- 2.2 Analisis Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.2 Program Dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Program Dan Kegiatan
- 4.2 Rencana Pendanaan Perangkat Daerah
- 4.3 Keterkaitan Rencana Kerja dan Pendanaan dengan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB V : PENUTUP

Bab II

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur

Program tahun lalu adalah program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2025. Program-program tersebut dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026. Berdasarkan Renstra tersebut, pada tahun 2025 terdapat 6 program dengan 12 kegiatan dan 21 sub kegiatan yang harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat beberapa kegiatan dan komponen kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pada tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan 6 program dengan 12 kegiatan dan 21 Sub kegiatan yang seluruhnya merupakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, terdiri dari:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini meliputi 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan antara lain:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan.
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- Program ini meliputi kegiatan :
1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- a) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

- a) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

C. Program Promosi Penanaman Modal.

Program ini meliputi kegiatan :

- 1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

D. Program Pelayanan Penanaman Modal.

Program ini meliputi kegiatan :

- 1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
 - b) Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan.

E. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Program ini meliputi kegiatan :

- 1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

F. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Program ini meliputi kegiatan :

1. Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- a) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Dari kegiatan dan sub kegiatan pada program tahun anggaran 2025, masih sedang berjalan menjelang akhir triwulan ke empat.

2.2 Analisis Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur

Analisis Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur sesuai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu (TA.2025/TW III) yang mengacu pada Renstra dan realisasi RPD dengan total Pagu Anggaran **Rp 4,812.135.393**, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Pagu Anggaran Rp 3.966.866.693)

Dari sisi realisasi anggaran, tingkat capaian program hingga Triwulan III rata-rata 67.77 % atau sebesar Rp 2.688.442.731 dari Rp 3.966.866.693 yang dianggarkan dan Capaian Kinerja mencapai 68 % dari 100% kinerja yang ditargetkan, dengan rincian sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Anggaran belum terealisasi dari yang ditargetkan sebesar Rp. 2.254.000. Berdasarkan output sub kegiatan realisasi fisik kegiatan ini mencapai 44,68% atau sebesar Rp 1.007.000,- namun dari 4 dokumen perencanaan yang ditargetkan baru dapat diselesaikan 1 dokumen.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terealisasi 26,33 % atau sebesar Rp. 2.788.000 dari anggaran Rp. 734.000.

- **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini mencapai 76,40 % atau sebesar Rp. 2.385.760.326 dari Rp. 3.122.847.183 yang dianggarkan dengan capaian kinerja mencapai 79 % atau sebanyak 331 orang yang terbayar dari 420 orang yang dianggarkan.

- **Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**

Realisasi anggaran untuk sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD mencapai 71,00 % atau sebesar Rp. 95.200.000 dari Rp. 134.080.000 yang dianggarkan. Dari sisi output kegiatan mencapai 83 % dimana dari 12 output yang ditargetkan telah terlaksana 10 output.

- **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.**

Anggaran untuk sub kegiatan ini mencapai 67,43 % atau sebesar Rp. 2.070.000 dari Rp 3.070.000. yang dianggarkan.

- **Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Realisasi anggaran untuk sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD mencapai 35,80 % atau sebesar Rp. 3.150.000 dari 8.800.000,00 Kemudian untuk realisasi fisik atau capaian output sub kegiatan ini mencapai 100 % karena dari 3 laporan yang ditargetkan telah terealisasi 3 laporan.

- **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Pagu anggaran untuk kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yaitu Rp. 49.451.900 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.116.900 atau 4,28 %.

- **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Capaian realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini mencapai 23,91 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.226.540 dari Rp. 130.607.040 yang dianggarkan.

- **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.**

Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang direncanakan tahun 2025 adalah sebanyak 2 paket dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.400.000 dari pagu anggaran Rp. 3.750.000 .

- **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang direncanakan tahun 2025 adalah sebanyak 2 paket dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000 dari pagu anggaran Rp. 3.600.000,00.

- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Dalam Tahun Anggaran 2025, realisasi anggaran untuk sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mencapai 29,61% atau Rp. 13.546.000 dari Rp. 45.745.000 yang dianggarkan. Dari 12 Output laporan yang ditargetkan dapat terealisasi sebanyak 6 laporan.

- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Capaian realisasi anggaran dari kegiatan ini adalah sebesar 73,37 % atau sebesar Rp. 73.135.263 dari Rp. 99.685.520 yang dianggarkan. Realisasi kinerja pada sub kegiatan ini mencapai 69% atau sebanyak 9 laporan dari 13 laporan yang ditargetkan.

- **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Capaian realisasi anggaran sub kegiatan mencapai 53,98 % atau pada sub kegiatan ini meliputi pemeliharaan kendaraan dan pajak kendaraan. Realisasi kinerja pada sub kegiatan ini mencapai 46% atau sebanyak 9 unit dari 24 unit yang ditargetkan.

- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Anggaran yang disediakan pada sub kegiatan ini sebesar Rp.

30.630.000 dengan realisasi Rp. 10.980.000 atau 35,85 %.

- **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasama Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Anggaran yang di sediakan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 208.000.000 dan belum direalisasikan.

b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal memiliki satu kegiatan dengan satu sub kegiatan meliputi ;

- **Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**

Realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 72,08 % atau Rp. 10.200.000 dari Rp 14.150.000.

- **Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**

Anggaran pada kegiatan ini belum terealisasi sebesar Rp 4.625.000 yang dianggarkan.

c. Program Promosi Penanaman Modal memiliki satu sub kegiatan yang meliputi ;

- **Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/kota**

Realisasi anggaran pada kegiatan ini mencapai Rp. 22.825.000 dari Rp. 33.715.000 yang dianggarkan atau 76,60 %.

d. Program Pelayanan Penanaman Modal memiliki satu kegiatan dengan dua sub kegiatan (Pagu Rp 698.053.700) yang meliputi ;

- **Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini mencapai 79,42 % atau sebesar Rp. 515.633.236 dari yang dianggarkan sebesar Rp. 649.223.700. Dari sisi output untuk kegiatan ini tergetnya 4.000 pelaku usaha yang diselesaikan tepat waktu dengan realisasi mencapai 209 % dimana kinerja telah melampaui target dengan realisasi sebanyak 8.342 Pelaku Usaha.

- **Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan**

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 48.670.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.550.00 atau 60,72 %. Dari sub kegiatan ini ditargetkan sebanyak 8 kasus pengaduan dan 1 yang sudah di selesaikan.

e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, meliputi;

- **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal**

Realisasi anggaran dari program ini mencapai Rp. 30.080.000 dari yang dianggarkan sebesar Rp. 44.400.000 atau 67,75 %.

f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, meliputi;

- **Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**

Alokasi anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 50.655.000 dengan realisasi Rp. 29.550.000 atau 58,39 %.

Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu yang mengacu pada Renstra dan realisasi RPD dapat dilihat pada lampiran table 2.2.1 dan table 2.2.2

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas PMPTSP

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan perizinan satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas PMPTSP mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas dukungan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang diemban Dinas PMPTSP tersebut, terdapat beberapa permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi dan memerlukan pemecahan untuk dapat membantu tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja dan penetapan program dan kegiatan prioritas Dinas PMPTSP.

Permasalahan dan isu strategis yang dihadapi adalah seperti dalam table 2.3.1.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan bagian dari proses perencanaan partisipatif yang bertujuan untuk menjaring aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan masyarakat dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan berusaha. Usulan masyarakat dihimpun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada tingkat desa/kelurahan,

kecamatan, hingga Musrenbang kabupaten, serta melalui forum konsultasi publik dan mekanisme pengaduan pelayanan.

Usulan yang disampaikan masyarakat umumnya berkaitan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan perizinan, kemudahan akses informasi perizinan dan penanaman modal, percepatan waktu penyelesaian perizinan, serta peningkatan sosialisasi kebijakan perizinan berusaha. Selain itu, terdapat pula usulan terkait penguatan pendampingan pelaku usaha mikro dan kecil dalam pemenuhan persyaratan perizinan berusaha.

Dalam melakukan penelaahan, DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur mempertimbangkan kesesuaian usulan masyarakat dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, arah kebijakan nasional dan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta ketersediaan anggaran. Usulan yang berada di luar kewenangan DPMPTSP akan dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa sebagian besar usulan masyarakat sejalan dengan sasaran dan program DPMPTSP, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan pengembangan iklim penanaman modal. Oleh karena itu, usulan-usulan tersebut diakomodasi ke dalam program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Bab III

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional disusun sebagai dasar untuk memastikan bahwa perencanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya pada bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan berusaha. Keselarasan tersebut diperlukan agar pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional secara efektif dan terintegrasi.

Kebijakan nasional di bidang penanaman modal diarahkan pada peningkatan iklim investasi yang kondusif, percepatan realisasi investasi, serta penyederhanaan dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha. Pemerintah pusat mendorong reformasi struktural melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko (Risk Based Approach/RBA) dan pemanfaatan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS). Kebijakan ini menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, kompetensi aparatur, serta kualitas sistem pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel.

Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, pemerintah pusat juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola penanaman modal yang berorientasi pada hasil, peningkatan kualitas data dan informasi investasi, serta penguatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Pemerintah daerah diharapkan mampu berperan aktif dalam pemantauan realisasi investasi, pembinaan pelaku usaha, serta fasilitasi penyelesaian hambatan investasi di daerah.

Selain itu, kebijakan nasional pembangunan berkelanjutan mengamanatkan agar pengembangan penanaman modal memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan tata ruang. Hal ini

tercermin dalam kewajiban penyelarasan kebijakan penanaman modal dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, perencanaan penanaman modal di daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai investasi, tetapi juga pada keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah pusat juga mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta penguatan pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam konteks ini, DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur dituntut untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan berusaha direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terukur, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan telaahan terhadap kebijakan nasional tersebut, Renja DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 disusun dengan mengarahkan program dan kegiatan pada peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha, pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif, penguatan promosi dan realisasi investasi, serta peningkatan kualitas data dan pengendalian penanaman modal. Dengan demikian, pelaksanaan Renja DPMPTSP diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah secara sinergis.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur

Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2025–2029. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, isu strategis

perangkat daerah, serta arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Tujuan perangkat daerah mencerminkan kondisi yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sedangkan sasaran merupakan hasil yang diharapkan secara terukur sebagai dasar penetapan indikator kinerja dan target tahunan. Dengan perumusan tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Tabel 3.2
Tujuan Perangkat Daerah Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur

No	Tujuan	Indikator	Target (%)
1	Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing melalui peningkatan realisasi investasi serta penyelenggaraan pelayanan publik Yang Prima	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	1

Tabel 3.3
Sasaran Perangkat Daerah Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Realisasi Investasi di daerah	Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA (Milyar Rupiah)	Rp.543.662.766.590
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	93
3	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%)	1.6

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ditetapkan bahwa setiap nomenklatur program dirinci sampai dengan sub kegiatan. Karenanya tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur dapat dicapai melalui pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun seluruhnya merupakan Urusan Wajib yaitu Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.

Seperti yang telah dikemukakan pada bab I diatas bahwa program dan kegiatan pada tahun anggaran 2026 merupakan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas PMPTSP Tahun 2024-2026 dan mengalami penyesuaian-penyesuaian terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur maka program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 adalah sebanyak 6 program, dengan 13 kegiatan dan 22 sub kegiatan yang merupakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar di bidang Penanaman Modal dengan uraian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program ini meliputi kegiatan antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Program ini meliputi kegiatan :

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan
 - a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota.

C. Program Promosi Penanaman Modal.

Program ini meliputi kegiatan :

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

D. Program Pelayanan Penanaman Modal.

Program ini meliputi kegiatan :

1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
 - b. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

E. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Program ini meliputi kegiatan :

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengawasan Penanaman Modal.

F. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Program ini meliputi kegiatan :

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Bab IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Rencana Program Dan Kegiatan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun berjalan. Rencana kerja ini memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah pada urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Program dan kegiatan yang direncanakan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan berusaha, penguatan iklim investasi yang kondusif, peningkatan realisasi investasi daerah, serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Penyusunan rencana kerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterpaduan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target yang terukur dan berorientasi pada hasil.

4.2 Rencana Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana pendanaan DPMPSTSP Kabupaten Lombok Timur disusun untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengalokasian pendanaan dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip penganggaran berbasis kinerja, prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan keuangan daerah. Setiap program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang

jenis sehingga penggunaan anggaran dapat diukur tingkat efektivitas dan efisiensinya.

4.3 Keterkaitan Rencana Kerja dan Pendanaan dengan Sasaran Pembangunan Daerah

Rencana kerja dan pendanaan DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur disusun secara selaras dan terintegrasi dengan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD dan RPJMD. Keterkaitan tersebut diwujudkan melalui kesesuaian antara program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah serta dukungan terhadap pencapaian target kinerja daerah.

Melalui perencanaan kerja dan pendanaan yang terarah dan terukur, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan investasi daerah dan kualitas pelayanan publik.

Rumusan Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 beserta pendanaannya dapat dilihat pada table 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2

Tabel. TC. 33

Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		2	4.372.221.698,00		1,6	4.428.236.815,00
2	18	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan		100	6.120.500,00		100	6.159.671,00
2	18	1	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4	3.288.500,00		4	3.309.546,00
2	18	1	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5	2.832.000,00		5	2.850.125,00
2	18	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai rencana		100	3.417.951.147,00		100	3.439.826.035,00
2	18	1	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		462	3.341.119.147,00		462	3.362.502.310,00
2	18	1	202	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	73.680.000,00		12	74.151.552,00
2	18	1	202	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2	3.152.000,00		2	3.172.173,00
2	18	1	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan aset/barang milik daerah		100	4.800.000,00		100	4.830.720,00
2	18	1	203	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		3	4.800.000,00		3	4.830.720,00
2	18	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan pelayanan umum perangkat daerah		100	147.786.990,00		100	148.732.827,00

2	18	1	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	4.185.000,00	1	4.211.784,00
2	18	1	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	44.146.990,00	1	44.429.531,00
2	18	1	206	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	9.711.000,00	2	9.773.150,00
2	18	1	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	4.800.000,00	2	4.830.720,00
2	18	1	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	84.944.000,00	12	85.487.642,00
2	18	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan aset yang direncanakan	100	59.000.000,00	100	59.377.600,00
2	18	1	207	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	-	2	
2	18	1	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	59.000.000,00	1	59.377.600,00
2	18	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	100	455.700.000,00	100	458.616.480,00
2	18	1	208	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	-	1	-
2	18	1	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	190.500.000,00	12	191.719.200,00
2	18	1	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	265.200.000,00	13	266.897.280,00

2	18	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	280.863.061,00		100	310.693.482,00
2	18	1	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	148.680.000,00		24	149.631.552,00
2	18	1	209	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	-		1	-
2	18	1	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	10.980.000,00		4	11.050.272,00
2	18	1	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1			1	28.032.898,00
2	18	1	209	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	121.203.061,00		1	121.978.760,00
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	60	156.000.000,00		70	157.998.608,00
2	18	2	201		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang penanaman modal	1	156.000.000,00		1	157.998.608,00
2	18	3	201	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	100.000.000,00		1	101.640.208,00
2	18	2	202		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi	1	56.000.000,00		1	56.358.400,00
2	18	2	202	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupate/kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	56.000.000,00		1	56.358.400,00
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi	11	31.180.000,00		12	31.579.465,00
2	18	3	201		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi investasi	2	31.180.000,00		2	31.579.465,00
2	18	3	201	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	31.180.000,00		2	31.579.465,00

2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan		65	211.055.340,00		75	213.759.295,00
2	18	4	201		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan		100	211.055.340,00		100	213.759.295,00
2	18	4	201	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5000		195.173.340		5500	197.775.650,20
2	18	4	201	0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	8		15.882.000		8	15.983.644,80
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penanaman Modal		100	102.750.000,00		100	104.066.391,00
2	18	5	201		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modsal		100	102.750.000,00		100	104.066.391,00
2	18	5	201	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8				8	8.051.200,00
2	18	5	201	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	163				163	11.410.775,00
2	18	5	201	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	160		102.750.000,00		167	84.604.416,00

2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha		90	76.740.000,00		92	77.723.162,00
2	18	6	201		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase inventarisasi data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi		100	76.740.000,00		100	77.723.162,00
2	18	6	201	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		1	76.740.000,00		1	77.723.162,00
Jumlah Total									4.949.947.038,00			5.013.363.736,00

Selong, 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Timur

drh. H. ACHSAN NASIRUL HUDA
NIP. 19660427199303 1 010

Bab V

P e n u t u p

5.1 Catatan Penting

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini disusun secara sistematis, terukur, dan terintegrasi sebagai penjabaran dari Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025–2029 serta selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026.

Dalam pelaksanaannya, Renja ini harus dipahami sebagai dokumen yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, serta kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, penyesuaian terhadap program, kegiatan, dan target kinerja dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sepanjang tidak mengubah arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 berjalan efektif dan akuntabel, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. **Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran**

Pelaksanaan program dan kegiatan harus konsisten dengan Renja, RKPD, dan dokumen penganggaran daerah serta mengacu pada prinsip penganggaran berbasis kinerja.

2. **Akuntabilitas dan Transparansi**

Setiap pelaksanaan kegiatan wajib didukung dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang transparan serta dapat

dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Orientasi pada Hasil (Outcome Oriented)

Program dan kegiatan dilaksanakan dengan fokus pada pencapaian target dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan dan realisasi penanaman modal.

4. Sinergi dan Koordinasi Lintas Sektor

Pelaksanaan Renja dilaksanakan secara sinergis dengan perangkat daerah terkait, pemerintah provinsi dan pusat, serta pemangku kepentingan lainnya guna mendukung iklim investasi yang kondusif.

5. Penerapan Tata Kelola yang Baik

Seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan harus menjunjung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), termasuk kepatuhan terhadap indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, khususnya pada sektor perizinan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya untuk memastikan Renja DPMPSTP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 dapat diimplementasikan secara optimal, maka dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Renja dan dokumen penganggaran daerah.
2. Menjabarkan target kinerja Renja ke dalam Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan untuk memastikan ketercapaian target kinerja.

4. Menyusun laporan kinerja perangkat daerah secara tepat waktu sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan pada tahun berikutnya.
5. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka penguatan iklim penanaman modal dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan.

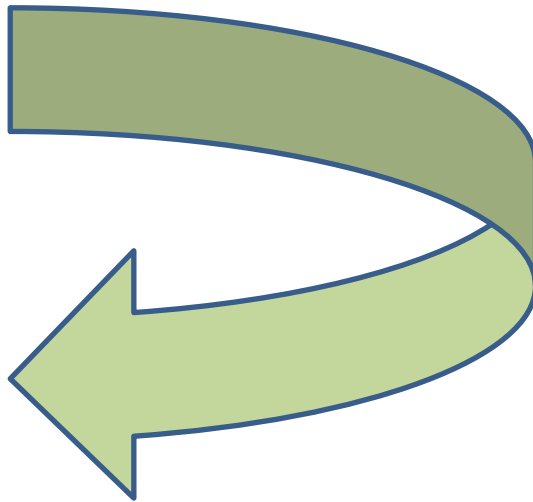
Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026, diharapkan seluruh jajaran perangkat daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal, terarah, dan bertanggung jawab, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan investasi daerah dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lombok Timur.

Lombok Timur, Januari 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



drh. H. ACHSAN NASIRUL HUDA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660427 199303 1 010

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Tabel 2.3.1
Permasalahan dan Isu Strategis Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur

No	Program	Masalah	Isu Strategis
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-Perlu penguatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja -Belum optimalnya konsistensi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja -Tuntutan peningkatan nilai SAKIP dan kepatuhan MCP KPK	-Penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah -Peningkatan efektivitas pengendalian internal dan tindak lanjut hasil pengawasan
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-Iklim investasi daerah belum sepenuhnya kondusif dan kompetitif -Keterbatasan data potensi investasi yang terstruktur dan berbasis wilayah/sektor -Belum optimalnya dokumen perencanaan penanaman modal daerah	-Penguatan iklim penanaman modal yang berdaya saing -Penyusunan dan pemutakhiran Peta Potensi Investasi -Penyusunan dan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) daerah
3	Program Promosi Penanaman Modal	-Promosi investasi daerah belum optimal dan belum menjangkau investor potensial secara luas -Materi promosi investasi belum sepenuhnya berbasis potensi unggulan dan data terkini	-Peningkatan efektivitas promosi penanaman modal berbasis potensi unggulan daerah -Penguatan citra daerah sebagai tujuan investasi
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	-Masih terdapat keluhan pelaku usaha terkait waktu dan kepastian pelayanan -Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan berbasis digital dan standar pelayanan	-Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, dan transparan -Peningkatan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	-Kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan LKPM belum optimal -Masih terdapat permasalahan pelaksanaan penanaman modal di lapangan	-Penguatan pengendalian, pemantauan, dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal -Peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penanaman modal
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	-Data penanaman modal belum sepenuhnya mutakhir dan terintegrasi -Pemanfaatan sistem informasi investasi masih perlu ditingkatkan	-Penguatan sistem data dan informasi penanaman modal yang akurat dan terintegrasi -Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, pelayanan, dan promosi investasi

Tabel 2.2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja

Formulir E. 81 - Lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN LOMBOK TIMUR

RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERIODE PELAKSANAAN : JANUARI 2025 S.D. Desember 2025

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD :

1. Indikator : _____ Target 2025 : _____

2. Indikator : _____ Target 2025 : _____

Disisi dengan Anggaran Perubahan yang terakhir

No	Urutan	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Data diambil dari tabel TC.27 Renstra OPD		Disisi dengan realisasi TA. 2021 - 2024		Disisi sesuai target kinerja dan anggaran TA. 2023 induk dan perubahan terakhir (jika ada)		Disisi Realisasi kinerja dan anggaran sd Th.1		Disisi Realisasi kinerja dan anggaran sd Th.2		Disisi Realisasi kinerja dan anggaran sd Th.3		Disisi Realisasi kinerja dan anggaran sd Th.4		Kolom ini sudah ada formulanya dihitung secara otomatis									
					Target Renstra OPD pd Th 2026 (s.d. Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d. Renja/DPA OPD Th 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA OPD Th 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja/DPA OPD Th 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja/DPA OPD Th 2025		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra OPD s/d Th 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD sd Th 2026 (%)		OPD Penan (Berkas Jawab)			
					Satu	K	Rp.	K	Rp.	K	Induk (Rp.)	Perubahan (Rp.)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1				Tujuan OPD :																								
				Meningkatkan nilai investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan perorinan dalam mendukung penanaman modal	%	1	55	xx		15																		
				Sasaran OPD :																								
				Meningkatnya penanaman modal daerah melalui tata kelola pelayanan perorinan berkualitas	%	91		xx		91																		
		18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			4,683,183,166	5,567,573,694	4,461,902,339	4,812,135,393	1,371,245,809	167.90	1,087,700,547	870,334,611	-	168	3,329,280,967	68.25	69.19	168	8,896,854,661	189.97						
		2 18		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			4,683,183,166	5,567,573,694	4,461,902,339	4,812,135,393	1,371,245,809	167.90	1,087,700,547	870,334,611	-	168	3,329,280,967	68.25	69.19	168	8,896,854,661	189.97						
		2 18 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan prasarana pelayanan yg terawat dan berfungsi baik utk mendukung pelaksanaan program	%	100	4,010,660,700	100	3,674,428,864	100	3,968,692,339	3,966,866,693	23.59	935,756,577	24.73	981,317,169	19.44	771,368,985	-	68	2,688,442,731	67.75	67.77	84	6,362,871,595	83.88	158.65
		2 18 01 201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	%	100	2,453,349	100	9,780,600	100	5,042,000	5,042,000	20	1,007,000	15	734,000	-	-	-	35	1,741,800	34.53	34.53	135	11,521,600	134.53	469.63
		2 18 01 201 0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	1,875,471	4	6,992,600	4	2,254,000	2,254,000	1	1,007,000			-		1	1,007,000	25.00	44.68	5	7,999,600	125.00	426.54	
		2 18 01 201 0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	577,878	5	2,788,000	5	2,788,000	2,788,000	-	2	734,000			-	2	734,000	40.00	26.33	7	3,522,000	140.00	609.47	
		2 18 01 202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai rencana	%	100	3,713,972,375	100	3,332,427,714	100	3,434,619,439	3,259,997,183	27	888,776,617	27	921,493,960	20	672,759,749	-	74	2,483,030,326	73.68	76.17	174	5,815,458,040	173.68	156.58
		2 18 01 202 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30	3,589,807,984	30	3,155,453,714	30	3,306,989,439	3,122,847,183	116	860,216,617	124	883,413,960	91	642,129,749		331	2,385,760,326	1,103	76.40	361	5,541,214,040	1,203.3	154.36
		2 18 01 202 0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	117,581,612	12	169,770,000	12	124,560,000	134,080,000	3	28,560,000	4	38,080,000	3	28,560,000		10	95,200,000	83	71.00		264,970,000	-	225.35
		2 18 01 202 0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	6,582,779	2	7,204,000	2	3,070,000	3,070,000				2,070,000			-	2,070,000	-	67.43	2	9,274,000	100.00	140.88	
		2 18 01 203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan aset/barang milik daerah	%	100	5,874,816	100	5,400,000	100	5,400,000	8,800,000	-	-	42	2,250,000	17	900,000	-	58	3,150,000	58.33	35.80	158	8,550,000	158.33	145.54
		2 18 01 203 0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	5,874,816	3	5,400,000	3	5,400,000	8,800,000		1	2,250,000	2	900,000		3	3,150,000	100	35.80		8,550,000	-	145.54	

Rencana Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026

No	Urutan	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pd Thn 2026 (s.d. Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d. Renja/DPA OPD Th 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA OPD Th 2025			Realisasi Kinerja Pada Trisulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja/DPA OPD Th 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja/DPA OPD Th 2025		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra OPD s/d Th 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Th 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab				
					Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Induk (Rp.)	Perubahan (Rp.)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	12 = 8+9+10+11	13 = (6 + 12)		14 = 13/5x100%			
													K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										K	Rp.	K	Rp.
1	2		3	4		5	6		7		8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
	2	18	01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	%	100	22,460,485	100	71,164,160	100	260,927,980	233,153,940		3	6,772,960	5	13,418,500	12	30,597,980	-	-	20	50,789,440	19.77	21.78	120	121,953,600	119.77	542.97		
	2	18	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1,953,616	1	2,118,700	1	4,451,900	49,451,900				1,472,500		644,400			-	2,116,900	-	4.28		4,235,600	-	216.81		
	2	18	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10,449,389	1	30,623,360	1	114,234,080	130,607,040			6,372,960			24,853,580			-	31,226,540	-	23.91		61,849,900	-	591.90		
	2	18	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1,078,258	2	3,761,100	2	3,750,000	3,750,000					2,400,000				-	2,400,000	-	64.00		6,161,100	-	571.39		
	2	18	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	2	1,252,400	2	7,200,000	2	3,600,000	3,600,000					1,500,000				-	1,500,000	-	41.67		8,700,000	-	694.67		
	2	18	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	7,726,822	12	27,461,000	12	134,892,000	45,745,000		2	400,000	4	11,946,000		1,200,000			6	13,546,000	50	29.61		41,007,000	-	530.71	
	18	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian pengadaan aset yang direncanakan	%	100	10,436,666	100	174,028,000		-											-	-	-	-	100	174,028,000	100.00	1,667.47		
	18	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	7,305,666	12	56,190,000																						
	18	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30	3,131,000	30	117,838,000																						
	2	18	01	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian layanan	%	100	169,919,295	100	113,562,900	100	99,685,520	99,685,520		29	29,000,000	22	22,008,863	22	22,126,400	-	-	73	73,135,263	73.37	73.37	173	186,698,163	173.37	109.87		
	2	18	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	101,950,782	13	110,562,900	13	99,685,520	99,685,520		4	29,000,000	2	22,008,863	3	22,126,400			9	73,135,263	69	73.37		183,698,163	-	180.18	
	2	18	01	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	85,543,714	100	142,093,490	100	163,017,400	360,188,050		3	10,200,000	13	21,411,846	28	44,984,856	-	-	44	76,596,702	43.56	21.27	144	218,690,192	143.56	255.65		
	2	18	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	24	69,888,716	24	132,943,490	24	141,537,400	121,558,050		3	1,050,000		21,411,846	8	43,154,856			11	65,616,702	46	53.98		198,560,192	-	284.11	
	2	18	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	5,218,333	4	9,150,000	4	21,480,000	30,630,000		15	9,150,000			-	1,830,000											
	2	18	01	209	0001.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	1	1,565,500			1		208,000,000																		

Rencana Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026

No	Urutan	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pd Thn 2026 (s.d. Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d. Renja/DPA OPD Th 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA OPD Th 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja/DPA OPD Th 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja/DPA OPD Th 2025		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra OPD s/d Th 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD sd Th 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab
					Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Induk (Rp.)	Perubahan (Rp.)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
													K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2		3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		12a=12/7x100%		13= (6 + 12)		14=13/5x100%		15
		2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah penetapan kebijakan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal.	%	90	26,180,781	90	22,425,000	100	15,275,000	18,650,000	30.56	5,700,000	10.80	1,650,000	18.66	2,850,000	-	-	60	10,200,000	60.02	54.69	75	32,625,000	83.35	124.61	
		2 18 02 201	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya fasilitas/insentif penanaman modal	%	100	13,090,390	100	17,800,000	100	10,650,000	14,150,000	40	5,700,000	15	1,650,000	27	2,850,000	-	-	83	10,200,000	82.54	72.08	183	28,000,000	182.54	213.90	
		2 18 03 201 0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	2	13,090,390	2	17,800,000	2	10,650,000	14,150,000	-	5,700,000	1	1,650,000		2,850,000			1	10,200,000	50.00	72.08	3	28,000,000	150.00	213.90	
		2 18 02 202	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan potensi investasi	Dokumen	2	13,090,390	2	4,625,000	100	4,625,000	4,500,000	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	2	4,625,000	100.00	35.33	
		2 18 02 202 0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	1	13,090,390		4,625,000	1	4,625,000	4,500,000						-											
		2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase pelaksanaan ekspose dan promosi potensi investasi	%	100	35,190,253	100	33,750,000	100	18,925,000	33,715,000	57.02	19,225,000	17.44	3,300,000	17.44	3,300,000	-	-	92	25,825,000	91.90	76.60	96	59,575,000	95.95	169.29	
		2 18 03 201	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pameran potensi investasi penanaman modal	%	100	35,190,253	100	33,750,000	100	18,925,000	33,715,000	57	19,225,000	17	3,300,000	17	3,300,000	-	-	92	25,825,000	91.90	76.60	192	59,575,000	191.90	169.29	
		2 18 03 201 0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	2	35,190,253	2	33,750,000	2	18,925,000	33,715,000		19,225,000		3,300,000		3,300,000			-	25,825,000	-	76.60	2	59,575,000	100.00	169.29	
		2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat.	%	91.5	254,472,283	92	1,370,133,830	92	363,800,000	697,893,700	51.02	387,064,232	21.45	84,833,378	18.53	73,285,626	-	-	91	545,183,236	98.92	78.12	91	1,915,317,066	99.73	752.66	
		2 18 04 201	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Lombok Timur	%	100	254,472,283	100	1,370,133,830	100	363,800,000	697,893,700	55	387,064,232	23	84,833,378	20	73,285,626	-	-	99	545,183,236	98.92	78.12	199	1,915,317,066	198.92	752.66	
		2 18 04 201 0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara		Peta Kuasa			4,000	1,237,810,830	4,000	315,055,000	649,223,700	1,494	374,464,232	3,736	76,883,378	3,112	64,285,626			8,342	515,633,236	209	79.42		1,753,444,066	-	-	
		2 18 04 201 0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Peta Kuasa			8	132,323,000	8	48,745,000	48,670,000		12,600,000		7,950,000	1	9,000,000			1	29,550,000	13	60.72		161,873,000	-	-	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
 Faktor penghambat pencapaian kinerja :
 Tindak lanjut diperlukan dalam trwulan berikutnya :
 Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya :

H. M. ZAIDAR ROHMAN, S.STP., MH.
Nip. 19751218 199511 1 001

Tabel 2.2.1

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025
TRIWULAN III 2025**

Nama OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Urusan : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 Bidang : PENANAMAN MODAL

Kode Rekening				Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Triwulan lalu					Triwulan ini					s/d Triwulan ini					SISA ANGGARAN	
					Induk	Perubahan	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik			Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik			Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik				
							Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Volume	Kinerja (%)	Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Volume	Kinerja (%)	Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Volume	Kinerja (%)	Fisik (%)		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4,461,902,339	4,812,135,393	2,458,946,356	51.10				870,334,611	19.51				3,329,280,967					1,482,854,426
2	18			1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4,461,902,339	4,812,135,393	2,458,946,356	51.10				870,334,611					3,329,280,967	69.19				1,482,854,426
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,968,692,339	3,966,866,693	1,917,073,746	48.33	100	48.33	24.16	771,368,985	19.45	100	19.45	9.72	2,688,442,731	67.77	100	67.77		1,278,423,962
2	18	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,042,000	5,042,000	1,741,000	34.53	100	34.53	17.26	-	-	100	-	-	1,741,000	34.53	100	34.53		3,301,000
2	18	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,254,000	2,254,000	1,007,000	44.68	4	44.68	558.45	-	-	4	-	-	1,007,000	44.68	4	44.68		1,247,000
2	18	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,788,000	2,788,000	734,000	26.33	5	26.33	263.27	-	-	5	-	-	734,000	26.33	5	26.33		2,054,000
2	18	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,434,619,439	3,259,997,183	1,810,270,577	55.53	100	52.71	26.35	672,759,749	20.64	100	19.59	9.79	2,483,030,326	76.17	100			951,589,113
2	18	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,306,989,439	3,122,847,183	1,743,630,577	55.83	30	55.83	93.06	642,129,749	20.56	30	20.56	34.27	2,385,760,326	76.40	30	76		737,086,857
2	18	1	202	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	124,560,000	134,080,000	66,640,000	49.70	12	49.70	207.09	28,560,000	21.30	12	21.30	88.75	95,200,000	71.00	12	71.0		38,880,000
2	18	1	202	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,070,000	3,070,000	-	-	2	-	-	2,070,000	67.43	2	67.43	1,686	2,070,000	67.43	2	67.43		1,000,000
2	18	1	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5,400,000	8,800,000	2,250,000	25.57	100	41.67	20.83	900,000	10.23	100	16.67	8.33	3,150,000	35.80	100			2,250,000
2	18	1	203	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,400,000	8,800,000	2,250,000	25.57	3	41.67	694.44	900,000	10.23	3	10.23	170.45	3,150,000	35.80	3	51.89		5,650,000
2	18	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	260,927,980	233,153,940	20,191,460	8.66	100	7.74	3.87	30,597,980	13.12	100	11.73	5.86	49,289,440	21.14	100			211,638,540
2	18	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,451,900	49,451,900	1,472,500	2.98	1	2.98	148.88	644,400	1.30	1	1.30	65.15	2,116,900	4.28	1	4.28		2,335,000
2	18	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114,234,080	130,607,040	6,372,960	4.88	1	4.88	243.97	24,853,580	19.03	1	19.03	951.46	31,226,540	23.91	1	23.91		83,007,540
2	18	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,750,000	3,750,000	-	-	2	-	-	2,400,000	64.00	2	64.00	1,600.00	2,400,000	64.00	2	64.00		1,350,000
2	18	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,600,000	3,600,000	-	-	2	-	-	1,500,000	41.67	2	41.67	1,041.67	-	-	2	41.67		3,600,000

2	18	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134,892,000	45,745,000	12,346,000	26.99	12	26.99	112.45	1,200,000	2.62	12	2.62	10.93	13,546,000	29.61	12	29.61		121,346,000
2	18	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,685,520	99,685,520	51,008,863	51.17	100	51.17	25.58	22,126,400	22.20	100	22.20	11.10	73,135,263	73.37	100			26,550,257
2	18	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99,685,520	99,685,520	51,008,863	51.17	13	51.17	196.81	22,126,400	22.20	13	22.20	85.37	73,135,263	73.37	13	73.37		26,550,257
2	18	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163,017,400	360,188,050	31,611,846	8.78	100	19.39	9.70	44,984,856	12.49	100	27.60	13.80	65,616,702	18.22	100			97,400,698
2	18	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	141,537,400	121,558,050	22,461,846	18.48	24	18.48	38.50	43,154,856	35.50	24	35.50	73.96	65,616,702	53.98	24	53.98		55,941,348
2	18	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21,480,000	30,630,000	9,150,000	29.87	4	29.87		1,830,000	5.97	4	5.97		10,980,000	35.85	4	35.85		19,650,000
2	18	1	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	208,000,000	-	-	4	-		-	-	4	-		-	-	4	-		208,000,000
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL	15,275,000	18,650,000	7,350,000	39.41	100	48.12	24.06	2,850,000	15.28	100	18.66	9.33	10,200,000	54.69	100	66.78		8,450,000
2	18	2	201		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10,650,000	14,150,000	7,350,000	51.94	100	69.01	34.51	2,850,000	20.14	100	26.76	13.38	10,200,000	72.08	100	82.39		3,950,000
2	18	2	201	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	10,650,000	14,150,000	7,350,000	51.94	2	51.94	1,298.59	2,850,000	20.14	2	20.14	503.53	10,200,000	72.08	2	72.08		3,950,000
2	18	2	202		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4,625,000	4,500,000	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-		4,625,000
2	18	2	202	4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupate/kota	4,625,000	4,500,000	-	-	1	-		-	-	1	-			-	1	-		4,500,000
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	18,925,000	33,715,000	22,525,000	66.81	100	119.02	59.51	3,300,000	9.79	100	17.44	8.72	25,825,000	76.60	100	136.46		7,890,000
2	18	3	20.1		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	18,925,000	33,715,000	22,525,000	66.81	100	119.02	59.51	3,300,000	9.79	100	17.44	8.72	25,825,000	76.60	100	127.74		7,890,000
2	18	3	20.1	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	18,925,000	33,715,000	22,525,000	66.81	2	66.81	1,670.25	3,300,000	9.79	2	9.79	244.70	25,825,000	76.60	2	76.60		7,890,000
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	363,800,000	697,893,700	471,897,610	67.62	100	129.71	64.86	73,285,626	10.50	100	20.14	10.07	545,183,236	78.12	100	149.86		152,710,464
2	18	4	20.1		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	363,800,000	697,893,700	471,897,610	67.62	100	129.71	64.86	73,285,626	10.50	100	20.14	10.07	545,183,236	78.12	100	139.79		152,710,464

2	18	4	20.1	6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	315,055,000	649,223,700	451,347,610	69.52	4,000	69.52	0.87	64,285,626	9.90	4,000	9.90	0.12	515,633,236	79.42	4,000	79.42		133,590,464
2	18	4	20.1	7	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	48,745,000	48,670,000	20,550,000	42.22	8	42.22	263.89	9,000,000	18.49	8	18.49	115.57	29,550,000	60.72	8	60.72		19,120,000
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	44,555,000	44,400,000	19,850,000	44.71	100	44.55	22.28	10,230,000	23.04	100	22.96	11.48	30,080,000	67.75	100	67.51		14,320,000
2	18	5	20.1		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	44,555,000	44,400,000	19,850,000	44.71	100	44.55	22.28	10,230,000	23.04	100	22.96	11.48	30,080,000	67.75	100	56.03		14,320,000
2	18	5	20.1	1	Pemantauan Penanaman Modal	44,555,000	44,400,000	19,850,000	44.71	155	44.71	14.42	10,230,000	23.04	155	23.04	7.43	30,080,000	67.75	155	67.75		14,320,000
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	50,655,000	50,610,000	20,250,000	40.01	100	39.98	19.99	9,300,000	18.38	100	18.36	9.18	29,550,000	58.39	100	58.34		21,060,000
2	18	6	20.1		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50,655,000	50,610,000	20,250,000	40.01	100	39.98	19.99	9,300,000	18.38	100	18.36	9.18	29,550,000	58.39	100	49.16		21,060,000
2	18	6	20.1	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	50,655,000	50,610,000	20,250,000	40.01	1	40.01	2,000.59	9,300,000	18.38	1	18.38	918.79	29,550,000	58.39	1	58.39		21,060,000
JUMLAH						4,461,902,339	4,812,135,393	2,458,946,356	51.10				870,334,611	18.09				3,329,280,967	69.19				1,482,854,426

Selong, Oktober 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Lombok Timur

HUSNUL BASRI, SP.,M.M.A.
NIP. 19690726 200003 1 002